

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pendidikan didefinisikan sebagai proses perubahan sikap dan tingkah laku individu atau kelompok orang dalam mendewasakan diri melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pendidikan bertujuan untuk memberikan peserta didik pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk berinteraksi dalam masyarakat dan berkontribusi sebagai warga negara (Riau, 2024). Menurut Undang-Undang Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003, pendidikan diartikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya, seperti menyadari spiritualitas keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang dibutuhkan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1), "Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan," dan pada ayat (3) disebutkan bahwa "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa." Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak, yang maksudnya menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Hal ini menekankan bahwa pendidikan tidak sekedar mentransfer pengetahuan, tetapi juga membentuk kepribadian dan akhlak peserta didik.

Setiap warga negara memiliki kewajiban moral dan konstitusional untuk menjaga, melindungi, dan membela negara dari berbagai bentuk ancaman yang dapat mengganggu kedaulatan serta keutuhan wilayah Indonesia. Kewajiban bela negara ini bukan hanya tanggung jawab aparat keamanan semata, melainkan menjadi bagian dari tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat. Pelaksanaan bela negara didasarkan pada nilai-nilai luhur yang tercermin dalam Pancasila sebagai dasar ideologi bangsa, serta Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur hak dan

kewajiban warga negara. Konsep bela negara dalam perspektif luas tidak terbatas pada upaya menghadapi ancaman militer semata, tetapi juga mencakup berbagai bentuk ancaman non-militer yang semakin beragam di era globalisasi. Kemajuan pesat di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi telah menghadirkan tantangan yang kompleks, seperti *cybercrime*, infiltrasi budaya asing, hingga informasi yang dapat mengganggu stabilitas nasional. Hak dan kewajiban warga negara dalam membela negara serta berpartisipasi dalam upaya pertahanan dan keamanan nasional secara tegas diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam Pasal 27 ayat (3) yang menyatakan bahwa "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara" dan Pasal 30 ayat (1) yang menyebutkan bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara".

Generasi Alpha merupakan generasi yang tumbuh di era digital dan globalisasi, yang tidak mengalami langsung pahitnya masa penjajahan maupun perjuangan panjang dalam merebut kemerdekaan. Mereka tidak merasakan secara fisik penderitaan dan pengorbanan para pahlawan bangsa yang rela mempertaruhkan darah, air mata, bahkan nyawa demi tercapainya kemerdekaan Indonesia. Meskipun generasi Alpha tidak mengalami langsung perjuangan fisik tersebut, hal ini tidak berarti bahwa mereka tidak memiliki rasa tanggung jawab terhadap upaya bela negara. Meskipun tantangan yang dihadapi oleh generasi muda saat ini berbeda dengan yang dialami oleh generasi perjuangan kemerdekaan, namun tanggung jawab bela negara mereka tetaplah penting. Adanya kesenjangan pemahaman mengenai pentingnya bela negara antara generasi yang telah mengalami perjuangan kemerdekaan dengan generasi muda, khususnya Gen Alpha, perlu dijumpai untuk melanjutkan kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Mereka diharapkan dapat memahami nilai-nilai kebangsaan dan berperan aktif dalam menjaga kedaulatan, keutuhan, dan kemajuan negara.

Kemajuan teknologi yang begitu pesat pada dasarnya membawa harapan besar dalam dunia pendidikan. Teknologi tidak hanya diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas pembelajaran, tetapi juga memudahkan berbagai proses yang terlibat di dalamnya. Mulai dari penyampaian materi yang lebih

interaktif, akses informasi yang lebih luas, hingga sistem evaluasi yang lebih efisien semuanya menjadi mungkin berkat dukungan teknologi. Dengan pemanfaatan yang tepat, proses belajar-mengajar dapat menjadi lebih dinamis, menarik, dan relevan menggunakan kebutuhan zaman (Roziq Widhayaka et al., 2023).

Globalisasi telah membawa perubahan besar pada berbagai aspek kehidupan, termasuk pada hubungan antarbangsa yang sekarang semakin saling bergantung satu sama lain. di tengah proses pembangunan yang menuntut mobilisasi potensi sumber daya manusia serta kekayaan alam secara optimal, kemajuan teknologi menjadi faktor pendorong utama transformasi rakyat menuju keterbukaan dan transparansi dunia. tetapi, keterbukaan ini tidak lepas dari tantangan serius, terutama berkaitan dengan masuknya nilai-nilai asing yang bisa mengancam kedaulatan dan integritas bangsa. dalam konteks ini, ancaman internal meliputi segala bentuk tindakan yang dapat mengganggu keutuhan wilayah serta menghambat stabilitas dan keselamatan negara (Sunara Akbar et al., 2024).

Oleh karena itu, penting bagi setiap warga negara Indonesia untuk memahami secara utuh peran Pancasila sebagai dasar negara, terutama di tengah arus globalisasi yang kian kuat. Pancasila bukan sekadar simbol, namun juga fondasi nilai yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Sayangnya, kesadaran generasi muda terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam empat pilar kebangsaan yakni Pancasila. Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika semakin memudar. Arus global membawa masuk nilai-nilai baru yang tidak selalu sejalan dengan jati diri bangsa, sehingga diperlukan upaya serius untuk menanamkan kembali nilai-nilai luhur kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari.

Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan untuk mengedukasi warga negara, khususnya generasi muda, agar dapat aktif berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan membangun negara. Agar generasi yang akan datang dapat memiliki kesadaran yang tinggi terhadap bela negara dan mencintai tanah air, penekanan pendidikan mengenai kewarganegaraan merupakan hal yang sangat wajib (Atika, 2024). Pemerintah memberikan Pendidikan Kewarganegaraan dengan maksud agar setiap warga negara memiliki kepribadian yang baik.

Kecerdasan kewarganegaraan merujuk pada kemampuan seorang warga negara dalam memahami dan menjalankan tanggung jawabnya sebagai anggota masyarakat, yang meliputi aspek-aspek kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan spiritual.

Salah satu cara untuk menanamkan semangat pertahanan negara yang relevan dengan zaman ini kepada generasi mendatang adalah melalui Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). PPKn memiliki peran penting dalam membentuk kesadaran warga negara akan hak serta kewajibannya, sejalan dengan nilai-nilai luhur dan cita-cita bangsa Indonesia. Pendidikan ini tidak hanya memberikan pemahaman konseptual, namun juga mendorong peserta didik untuk menginternalisasi sikap serta perilaku yang mencerminkan karakter kebangsaan. Keberadaannya yang diajarkan secara berjenjang, mulai dari tingkat Sekolah Dasar hingga perguruan tinggi, menunjukkan komitmen negara dalam membekali generasi muda dengan fondasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap kebangsaan yang kuat. Dengan demikian, PPKn menjadi instrumen penting dalam mencetak generasi penerus yang tidak hanya cerdas secara intelektual, namun juga memiliki semangat nasionalisme dan tanggung jawab kebangsaan (Sunara Akbar et al., 2024).

Untuk dapat melaksanakan tugasnya secara optimal, guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di SD Negeri Lembang perlu memiliki kualifikasi yang memadai dalam membentuk kepribadian para siswa. Guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan nilai-nilai kebangsaan pada peserta didik. Oleh karena itu, guru PKn dituntut untuk melaksanakan tugasnya secara profesional dan penuh tanggung jawab. Tidak hanya menguasai materi pembelajaran, guru juga harus memiliki keterampilan kepribadian yang baik, karena aspek ini sangat penting dalam menanamkan nilai moral, etika, dan sikap positif kepada siswa. Melalui keteladanan dan pendekatan yang tepat, guru PKn berkontribusi langsung dalam membentuk generasi yang memiliki integritas, tanggung jawab, serta kesadaran akan pentingnya bela negara dan kehidupan berbangsa yang demokratis.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana nilai-nilai bela negara yang terkandung dalam Pancasila dapat diintegrasikan secara optimal dalam proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SD Negeri Lembang. Selain itu, penelitian ini juga menelaah bagaimana pemanfaatan teknologi dapat mendukung peningkatan kesadaran bela negara di kalangan siswa sekolah dasar. Dalam konteks perkembangan zaman yang ditandai dengan pesatnya kemajuan teknologi di era globalisasi, terdapat kebutuhan mendesak untuk memperkuat kembali pendidikan, khususnya nilai-nilai kebangsaan dan bela negara, sebagai bagian dari pembentukan karakter peserta didik sejak dini. Penguatan pendidikan Pancasila tidak hanya relevan, tetapi juga krusial dalam membentengi generasi muda dari pengaruh negatif era digital, seperti krisis identitas, degradasi moral, serta lunturnya semangat nasionalisme.

Lokasi penelitian ini dilakukan di SD Negeri Lembang, yang merupakan salah satu pendidikan jenjang sekolah dasar di Pamulihan, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Alamat SD Negeri Lembang berada di Dusun Lembang, Pamulihan, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45365. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa SD Negeri Lembang memiliki potensi dan karakteristik yang relevan dengan fokus penelitian, khususnya dalam konteks pengintegrasian nilai-nilai bela negara dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan serta pengaruh teknologi. Selain itu, SD Negeri Lembang memiliki latar sosial budaya yang khas sebagai bagian dari masyarakat pedesaan di Kabupaten Sumedang, yang menjadikan sekolah ini representatif untuk mengkaji bagaimana nilai-nilai Pancasila dan bela negara dapat ditanamkan sejak dini.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

- 1.2.1 Bagaimana keadaan kesadaran bela negara terhadap pembelajaran kewarganegaraan di SD Negeri Lembang?
- 1.2.2 Apa saja tantangan dan solusi yang dihadapi dalam mengintegrasikan kesadaran bela negara di era teknologi kelas V di SD Negeri Lembang?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Menganalisis keadaan kesadaran bela negara dalam pembelajaran kewarganegaraan di SD Negeri Lembang.
- 1.3.2 Mengidentifikasi tantangan dan solusi dalam pembelajaran di era teknologi kelas V di SD Negeri Lembang.

1.4 Manfaat Penelitian

- 1.4.1 Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai upaya untuk menyadari kesadaran bela negara pada peserta didik sekolah dasar agar memiliki rasa jiwa nasionalisme.
- 1.4.2 Penelitian ini dapat memberikan gambaran bagaimana perilaku kesadaran bela negara peserta didik kelas V SD Negeri Lembang. Sehingga orang tua maupun guru mampu membantu peserta didik dalam melindungi dan mempertahankan tanggung jawab terhadap negara.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini akan difokuskan pada integrasi nilai Pancasila dalam pembelajaran kewarganegaraan di SD Negeri Lembang, khususnya pada kelas V, serta pengaruh teknologi terhadap kesadaran bela negara.

